

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya badan usaha swasta bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin bagi kepentingan para pemiliknya. Namun pada sektor publik, selain kegiatan pelayanan yang bersifat bisnis juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam mencari laba menjadi tidak relevan untuk kegiatan dan operasi yang ada di sektor publik. Sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, target utama perusahaan swasta adalah laba dan eksploitasi sumber daya secara maksimal, sedangkan sektor publik bertugas untuk menyediakan pelayanan publik dan mendistribusikan kesejahteraan dalam berbagai konteks target sosial dan ekonomi. Sehingga untuk mengetahui keberhasilan dalam melakukan pelayanan publik maka suatu organisasi perlu melakukan pengukuran dalam kinerjanya.

Pengukuran kinerja sangat penting tidak hanya bagi organisasi bisnis milik swasta saja namun juga bagi organisasi bisnis yang dimiliki pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah (BUMN/BUMD). Keberhasilan manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan dapat diukur dari kegiatan operasional perusahaan yang sering disebut pengukuran kinerja perusahaan. Bambang wahyudi dalam mintarti (2002:2014) pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja dan potensi pengembangannya. Salah satu BUMD yang mengembangkan amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat

melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga untuk pengukuran kinerja juga harus menggunakan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Pengukuran kinerja PDAM mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan diatas, maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat. Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Adanya kepentingan pelayanan publik menyebabkan PDAM tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999

Tentang Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan melihat tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional, aspek administrasi, dimana Aspek Keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan, dapat di hitung dengan menggunakan rasio keuangan dimana untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat mengukur kinerjanya dengan sepuluh indikator yaitu: Rasio laba terhadap aktiva produktif, Rasio laba terhadap penjualan, Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar, Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, Rasio total aktiva terhadap total utang, Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, Jangka waktu penagihan piutang, Efektifitas penagihan.

Aspek Operasionalnya adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi yang ditentukan pada kepentingan *intern* perusahaan dengan melihat pada sepuluh indikator yaitu: Cakupan pelayanan, Kualitas air distribusi, Kontinuitas air, Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi, Tingkat kehilangan air, Peneraan meter air, Kecepatan penyabungan air, Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan, Kemudahan pelayanan, Rasio karyawan per 1000 pelanggan.

Aspek Administrasi adalah tata kelola perusahaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan tulis-menulis/membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di organisasi, dengan melihat pada sepuluh indikator yaitu: Rencana jangka panjang, Rencana organisasi dan uraian tugas, Prosedur operasi standar, Gambar nyata laksana, Pedoman penilaian kerja karyawan, Rencana kerja dan anggaran perusahaan, Tertib laporan internal, Tertib laporan

eksternal, Opini auditor independen, Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan pada PDAM Kota Gorontalo sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat membutuhkan adanya kinerja keuangan yang sehat, dimana dari tahun 2011-2014 kinerja perusahaan dari sisi laba selalu berfluktuasi bahkan terjadi penurunan sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut menyebabkan PDAM Kota Gorontalo tidak menjalankan misinya dengan baik, utamanya dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah. Untuk itu, PDAM Kota Gorontalo harus dikelola secara sehat agar dapat menciptakan laba terutama dalam segi keuangannya. Untuk aspek operasional PDAM Kota Gorontalo sebagai penyelenggara sistem air minum masih belum optimal dikarenakan PDAM Kota Gorontalo dinilai masih sangat rendah dalam cakupan pelayanan, ini disebabkan keterbatasan jaringan pipa distribusi air kepada masyarakat serta kecepatan penanggulangan kebocoran pipa air yang didistribusikan kepada masyarakat, konsumen maupun penyambungan pelanggan baru. Untuk itu dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan air minum, ini diharapkan dapat tercapainya kinerja yang efektif dan efisien. Dan untuk aspek administrasi masih perlu membenahan dikarenakan masih banyak konsumen PDAM yang tidak membayar rekening air dengan tepat waktu, keadaan yang demikian dapat mengganggu arus kas masuk yang berdampak pada tertundannya pendapatan dan keuntungan PDAM.

Dari Permasalahan diatas kinerja PDAM dapat dilihat dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi dari tahun ketahun selalu berfluktuasi. Karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendalanya. dari masalah itulah menarik peneliti yang sekarang untuk mengambil penelitian yang berjudul tentang. **Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo Mengacu Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999**'.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 Antara Lain:

1. Kinerja keuangan PDAM Kota Gorontalo dari tahun 2011-2014 berfluktuasi, hal tersebut menyebabkan PDAM kota gorontalo tidak menjalankan misinya dengan baik utamanya dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah.
2. Kinerja operasional, dinilai masih sangat rendah, disebabkan keterbatasan jaringan pipa distribusi air kepada masyarakat serta kecepatan penanggulangan kebocoran pipa.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja PDAM Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 selama periode tahun 2011-2014 dilihat dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PDAM Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah penegetahuan dan sebagai wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk upaya meningkatkan penilaian kinerja yang ada di perusahaan sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah di ditentukan dapat dicapai.